

BELAJAR DARI KEBERADAAN HOMELAND SECURITY AMERIKA SERIKAT (BUKAN UNTUK MENIRU BEGITU SAJA)

Dani Purwanegara*)

Pada tanggal 11 September 2001 masyarakat dunia pada umumnya, Amerika pada khususnya terguncang hebat karena Amerika Serikat yang seolah tak tersentuh oleh serangan pendadakan-didalam negerinya-mengalami serangkaian serangan teroris. Dua gedung menara kembar kebanggaan masyarakat bisnis Amerika yaitu World Trade Center (WTC), luluh lantak dihancurkan karena ditabrak pesawat komersial yang diduga dibajak teroris dan relatif baru tinggal landas- berarti muatan bahan bakarnya masih penuh. Gedung Departemen pertahanan Pentagon yang selama ini dianggap sangat steril dari ancaman tidak luput dari incaran teroris.

Predikat satu-satunya super power dunia yang dipercaya begitu kuat serta merta runtuh. Kebanggaan dan kejumawaan Amerika tercoreng. Bukan hal yang mustahil dalam waktu relatif singkat semua komponen kekuatan Amerika, tak peduli ia Presiden, para pelaku bisnis, anggota Senat dan Kongres, politisi, ilmuwan, swasta, masyarakat pada umumnya bersatu padu mengerahkan segenap upaya, pikiran, kemampuan dan sumberdaya nasionalnya guna

memulihkan citra Amerika Serikat sebagai negara yang tak pernah terkalahkan. Suasana dalam negeri Amerika seolah dibangkitkan kembali dari pengalaman sangat buruk ketika basis kekuatan angkatan laut AS di kawasan Pasifik Pearl Harbor, diserang secara mendadak oleh Armada Angkatan Laut Jepang.

Banyak tanggapan bervariasi atas peristiwa 11 September tersebut *pertama* ada yang menilai betapapun kuatnya pertahanan Amerika tak akan luput

*) Laksma TNI Dani Purwanegara, M.M., Staf Ahli Setjen Wantannas RI

dari titik lemah yaitu kelengahan karena kekuatannya, kelelahan untuk bersiaga (*vulnerability to staying alert*). Kedua ada yang menilai peristiwa itu adalah rekayasa pemerintah AS dan atau kaum Zionis untuk menyudutkan musuh besarnya yang baru-setelah Uni Sovyet runtuh yaitu Islam Fundamentalis- dengan begitu dapat menjadi alasan pembelar bagi pemerintah AS untuk meningkatkan belanja keamanan nasionalnya/pertahanannya. Ketiga benar-benar tindakan teroris untuk menyadarkan AS bahwa sebagai satu-satunya super power dunia AS tidak dapat memaksakan semua kehendaknya, ada kekuatan tersembunyi yang tak terjangkau oleh aparat pertahanan AS.

Lepas dari perbincangan tanggapan mana yang benar yang pasti dalam jangka waktu kurang dari satu bulan yaitu pada tanggal 8 Oktober 2001, Presiden AS, George W. Bush meresmikan berdirinya institusi baru *The Office Of Homeland Security* dilingkungan Gedung Putih dan mempunyai tanggung jawab utama menyusun dan menetapkan strategi nasional untuk melindungi keamanan dalam negerinya, suatu wilayah tugas dan institusi baru di lingkungan pemerintah AS.

Apa dan bagaimana kita dapat menarik pelajaran dari-

padanya adalah logis apabila kita dapat mendalaminya melalui konsep dan prinsip dasarnya. Sudah barang tentu kita tak bermaksud untuk meniru begitu saja, karena sistem nilai, doktrin, sumber daya, kebutuhan serta kemampuan kita berbeda. Yang menyebabkan kita harus belajar adalah ancaman teroris juga sudah, sedang dan akan tetap menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dan yang terutama dapat terjadi kapan saja, di mana saja ditempat-tempat dan sarana vital strategis yang ada di negara kita.

Pertimbangan dasar dibentuknya *Homeland Security* (Keamanan Dalam Negeri/ Kamdagri)

Sejak serangan teroris terhadap jantung kehidupan (keamanan dan kesejahteraan) AS, masyarakat dan pemerintahan AS menjadi sadar bahwa upaya melindungi keamanan dalam negerinya (*Kamdagri*) merupakan wilayah tugas yang rumit. Upaya ini memerlukan koordinasi antar fungsional/ sektoral/ departemen dan kewilayahan agar dapat memusatkan berbagai upaya baik pemerintah pusat maupun daerah, sektor privat maupun sektor publik dan seluruh masyarakat pada umumnya agar upaya tersebut benar-benar efektif, cepat, tepat dan

yang utama adalah terpadu dan sinergi.

Atas dasar kebutuhan itulah maka dibentuk *The Office for Homeland Security* yang mempunyai tugas pokok menyusun dan menetapkan strategi nasional untuk melindungi keamanan dalam negeri AS guna mencegah, menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan akibat ancaman teroris. Strategi nasional untuk melindungi keamanan dalam negeri AS ini mengarahkan dan menggambarkan kerangka kerja bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bisnis bahkan para individu warganegara AS agar dapat berkontribusi dan tentu saja mendapatkan insentif dalam setiap upaya melindungi keamanan dalam negerinya. Guna mendapatkan kekuatan legal dan dukungan pembiayaan maka Office ini mengajukannya kepada Congress. Strategi nasional ini akan menjadi landasan untuk mengorganisasikan berbagai upaya, menyiapkan arahan awal tentang prioritas kegiatan yang harus ditempuh.

Sasaran strategik

Segera setelah dibentuknya *The Department of Homeland Security*, para perancang organisasi ini segera menetapkan beberapa Sasaran (tugas) strategik dengan tujuan melindungi keamanan

dalam negerinya. Prioritas upayanya adalah: (1) Mencegah serangan/ancaman teroris di dalam negeri AS, (2) Mengurangi kelemahan AS dalam menghadapi ancaman teroris, dan (3) Memperkecil kerusakan dan memulihkan kondisi apabila ada serangan teroris.

Sasaran strategik ini dirancang mengingat dua hal yang berhadapan yaitu ancaman dan kelemahan. Ancaman teroris senantiasa dihadapkan pada setiap titik lemah Kamdagri AS. Ancaman teroris senantiasa memilih target yang secara fisik alamiah memang mengandung kelemahan serta tingkat kesia-gaan yang cenderung mengalami kejenuhan. Disisi lain teroris mempunyai aneka pilihan cara dan sarana yang sangat luas dan bervariasi bahkan tak terduga sebelumnya. Pilhan penggunaan senjata misalnya Nubika yang bervariasi mempunyai daya rusak yang luar biasa, demikian pula metode dan sarana tradisional dan konvensional misalnya *cyber attack*.

Para teroris mempunyai sel jaringan rumit, tersembunyi namun luas meliputi wilayah nasional, regional bahkan internasional dan tatalakunya kejam, berdarah dingin cenderung psikopat sehingga mampu mengerjakan sesuatu yang tak terpikirkan oleh akal sehat. Inilah

problema utama yang dihadapi para perancang strategi nasional untuk menjamin Kamdagri dari ancaman teroris.

Wilayah tugas yang kritis (Critical Mission Areas)

Strategi nasional untuk melindungi keamanan dalam negeri mengkoordinasikan kerjasama yang memfokuskan fungsi Kamdagri pada enam wilayah tugas kritikal yaitu :

Intelijens dan peringatan dini

Karakter terorisme sangat mengandalkan pendadakan (surprise), mengarahkan serangannya sedemikian rupa agar mampu menghancurkan secara tragis sasaran-sasaran yang tidak diawasi dan tidak mempunyai derajat kesiagaan tinggi. Tanpa andalan pendadakan upaya para teroris mudah untuk ditanggulangi oleh para petugas keamanan. Kerusakan yang ditimbulkanpun tidak akan sedahsyat apabila unsur pendadakan tidak ada pada pihak teroris. Bukan hal yang luar biasa apabila upaya penanggulangan terorismepun harus bertumpu pada kebutuhan untuk mencegah pendadakan (*to avoid surprise*).

Untuk mendukung kebutuhan tersebut maka intelijens dan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi kegiatan teroris sebe-

lum ia melaksanakan niatnya merupakan suatu keniscayaan. Keberadaan intelijens dan sistem peringatan dini akan memungkinkan dilaksanakannya upaya preemtive, preventive dan pro-aktif. Sarana ini menuntut adanya kemampuan analisis intelejens pada seluruh aparat kamdagri terkait, kemampuan infrastruktur Departemen Kamdagri terutama untuk mencari dan melakukan analisis informasi, Implementasi Sistem Dukungan Kamdagri dan dikembangkanya teknik "*tim merah*" guna menanggulangi setiap adanya upaya teroris secara cepat, tepat dan terpadu serta tertutup (*covert*).

Perbatasan dan keamanan transportasi

Wilayah perbatasan (baik yang berupa frontier maupun boundaries) merupakan wilayah yang terbuka dan rawan dari segala bentuk infiltrasi-subversi. Demikian pula transportasi nasional dengan beragam moda transportasinya dalam rangka menjamin sirkulasi dan mobilitas manusia, barang dan jasa sangat rawan terhadap upaya teror.

Sarana prasarana transportasi seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan raya, terminal KA - jalan KA, terminal bus, ASDP (angkutan sungai, danau

dan pantai), hyper market, pusat/konsentrasi kegiatan masyarakat semuanya merupakan sasaran empuk bagi teroris. Bukan hal luar biasa bila upaya untuk melindungi keamanan perbatasan dan transportasi adalah wilayah tugas kritikal ketika dihadapkan pada kemungkinan serangan pendadakan dari para teroris.

Memenuhi tuntutan kebutuhan diatas, Strategi untuk menjamin dan melindungi kepentingan Kamdagri mengidentifikasi 6 unsur inisiatif utama yaitu: (1) Meyakinkan bahwa keamanan perbatasan dan transportasi nasional akuntabel, (2) Mengembangkan Smart Border, (3) Meningkatkan keamanan pengapalan kontainer internasional, (4) Menerapkan secara ketat Undang-Undang 2001 tentang Keamanan Penerbangan dan Transportasi, (3) Memperkuat US Coast Guard, dan (4) Memperbaharui pelayanan imigrasi

Berdasar inisiatif ini maka presiden mengajukan usul kepada Congress bahwa Pelayanan Imigrasi dan Naturalisasi, Pelayanan Bea Cukai, Pelayanan Inspeksi Kesehatan Tumbuhan dan Hewan, Badan Keamanan Transportasi diintegrasikan pada Departemen Kamdagri AS

Kontra terorisme domestik

Serangan teroris terhadap menara kembar WTC telah menyadarkan pemerintah negara bagian dan pemerintah federal untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dan meredefinisi tugas-tugas dan otoritas negara federal, negara bagian dan lokal. Bila semula pemegang otoritas dan badan penegakan hukum bertugas untuk melakukan penyidikan dan menanggulangi kejahatan, maka sekarang mereka mempunyai tugas prioritas pada pencegahan dan interdiksi kegiatan teroris di dalam negeri AS.

Untuk keperluan diatas pemerintahan dan bangsa Amerika akan menggunakan semua sarana dan upaya legal- baik tradisional maupun non tradisional- untuk mengidentifikasi, menghentikan, menangkap teroris dbelahan bumi manapun dan mengadilinya di AS. Upaya ini tak hanya ditujukan pada perorangan yang terlibat dalam kegiatan teroris tetapi termasuk sumber dukungannya, baik orang maupun organisasi yang diketahui sebagai pihak yang membiayai teroris dan barang siapa yang menyediakan bantuan bantuan logistiknya. Melaksanakan reorientasi organisasi penegak hukum yang mengarahkan segenap upayanya demi tujuan kontra teroris memerlukan

tindakan yang menentukan meliputi beberapa wilayah kewenangan.

Strategi nasional untuk melindungi kamdagri AS setidaknya mengidentifikasi enam inisiatif pada area ini yaitu: (1) Meningkatkan koordinasi penegakan hukum lintas pemerintah, (2) Memfasilitasi upaya penangkalan terhadap teroris potensial, (3) Melanjutkan upaya penyidikan dan peradilan yang tengah berlangsung, (4) Menuntaskan restrukturisasi FBI agar mampu memperluas perlindungan terhadap serangan teroris, (5) Mengidentifikasi dan menentukan sasaran yang memberikan dukungan biaya bagi teroris, dan (6) Melacak, menangkap dan mengadili teroris asing.

Perlindungan pada infrastruktur kritikal dan aset strategis

Masyarakat dan kehidupan bangsa Amerika yang modern amat bergantung pada jaringan dan infrastruktur, termasuk jaringan fisik seperti energi dan sistem transportasi serta jaringan internet. Bila teroris merusak satu atau lebih bagian dari infrastruktur kritikal akan berpengaruh luas terhadap kerusakan keseluruhan sistem nasional dan akan menimbulkan bahaya signifikan terhadap bangsa dan negara Amerika. Oleh sebab itu upaya peningkatan perlin-

dungan terhadap bagian-bagian penting dan interkoneksi sistemnya merupakan kebutuhan mutlak guna memelihara agar sistem tersebut tetap berfungsi. Upaya ini selain akan lebih memastikan jaminan keamanan sistem, juga akan mengurangi tingkat kelemahan dan kerentanan terhadap bahaya bencana alam, kriminalitas terorganisir, pembobol komputer.

Strategi nasional untuk melindungi Kamdagri dalam konteks ini mengidentifikasi enam inisiatif utama yaitu: (1) Memadukan segenap upaya perlindungan terhadap berbagai infrastruktur kritis di bawah Departemen Kamdagri, (2) Membangun dan memelihara pengkajian yang akurat dan lengkap terhadap semua infrastruktur kritis dan aset asset kunci, (3) Menjalin dan mengembangkan kemitraan yang sehat dengan pemerintah daerah dan lokal serta sektor swasta, (4) Mengembangkan rencana perlindungan infrastruktur nasional, (5) Mengamankan cyberspace, (6) Memanfaatkan perangkat analitik dan pemodelan terbaik untuk mendapatkan jawaban tentang upaya perlindungan yang paling baik, (7) Melindungi infrastruktur dan aset kunci terhadap ancaman internal, (8) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat internasio-

nal untuk melindungi infrastruktur transnasional.

Pertahanan terhadap malapetaka terorisme/tragedi terorisme

Para ahli - teknologi dan material - merupakan sumber daya yang sangat penting dalam mengembangkan persenjataan yang mematikan kehidupan umat manusia. Persenjataan itu selama ini dikenal dengan senjata nuklir, radiologi yang penyebarannya sulit dicegah. Bila pihak lawan memanfaatkan persenjataan ini maka dampak yang ditimbulkan akan jauh berlipat ganda dibanding peristiwa 11 September. Berkaitan dengan hal diatas menjadi sangat penting dan mendesak bahwa kemampuan pemerintah untuk mendeteksi setiap ancaman teroris yang memanfaatkan senjata nuklir harus ada pada setiap tingkatan dan tersebar pada setiap posisi strategis diseluruh negeri.

Strategi nasional untuk melindungi Kamdagri mengidentifikasi enam inisiatif utama pada wilayah ini yaitu : (1) Mencegah teroris menggunakan senjata nuklir melalui peningkatan prosedur dan sensor yang lebih meyakinkan, (2) Mendeteksi sedini mungkin keberadaan peralatan biologi dan kimia illegal, (3) Mengembangkan sensor kimia dan teknik dekontaminasi, (4) Memperluas spektrum vakcina-

si, antimikrobiologi dan antidotes/penawar racun, (5) Memanfaatkan pengetahuan dan perangkat iptek untuk melawan terorisme, dan (6) Mengimplementasikan program mata-mata/agen terpilih.

Kesiapan dan tindakan darurat

Sebaik-baiknya upaya untuk memperkecil kerusakan dan memulihkan setiap akibat yang ditimbulkan serangan teroris adalah lebih baik mencegah sedini mungkin terhadap serangan teroris yang akan datang/*future attack* daripada dihadapkan pada kegagalan menghadapi pendudukan. Tindakan respons positif terhadap serangan teroris skala besar seperti halnya dalam menghadapi bencana nasional adalah tingkat kesiapan dan kesiagaan yang tinggi. Upaya untuk membangun sistem nasional komprehensif yang memungkinkan koordinasi dan pelaksanaan tindakan cepat, tepat, terpadu dan efektif dalam menghadapi dan menanggulangi serangan teroris adalah sesuatu kebutuhan dan sama sekali bukan suatu kemewahan.

Untuk itu diperlukan adanya suatu desain dan perencanaan, pengorganisasian, melengkapinya dengan peralatan dan perlengkapan yang sepadan, melatihnya dan menerapkan berbagai kesatuan dan memobilisa-

sinya tanpa harus melalui peringatan dini dalam menanggulangi setiap keadaan darurat. Berbagai kesatuan yang harus terlibat didalamnya antara lain adalah-polisi, pemadam kebakaran, palang merah, evakuasi medis/tenaga medis dan dokter, pekerjaan umum, militer, SAR, relawan dan kantor yang mempunyai otoritas untuk mengendalikan tindakan darurat/pemerintah lokal/pemerintah daerah.

Saat ini rencana gabungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diarahkan sebagai pendukung utama dari setiap tindakan menghadapi insiden, musibah, bencana alam yang biasanya bersifat/terjadi pada konteks lokal- kewilayahan meskipun dampaknya dapat saja bersifat nasional bahkan internasional. Rencana gabungan ini akan lebih memperluas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan upaya melawan terorisme. Upaya ini tetap berbasis pada kecerdasan untuk mencari nilai ganda dari perbedaan antara manajemen darurat dan manajemen risiko/konsekuensi.

Untuk memenuhi tuntutan diatas pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan pengembangan rencana dan membangun serta mengembangkan sistem nasional yang mampu memobilisasikan berbagai

upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah lokal. Seluruh jajaran pemerintah harus meyakinkan bahwa semua personal yang ditugaskan, organisasi yang dilengkapi dengan baik, telah dilatih dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan serangan teroris diseluruh wilayah AS.

Strategi nasional untuk melindungi Kamdagri mengidentifikasi 12 wilayah inisiatif utama pada wilayah ini antara lain: (1) Mengintegrasikan rencana-rencana tindakan pemerintah daerah kedalam suatu rencana manajemen menghadapi insiden secara terpadu, (2) Membangun sistem manajemen nasional dalam menghadapi insiden, (3) Meningkatkan kemampuan taktis kontra teroris, (4) Meningkatkan komunikasi tanpa hambatan diantara para responder, (5) Menyediakan dan menyediakan pelayanan kesehatan untuk ancaman teroris yang menimbulkan malapetaka/tragedi nasional (catastrophic terrorism). (6) Meningkatkan cadangan vaksin dan obat-obatan nasional, (7) Menyiapkan dekontaminasi nuklir, (8) Merencanakan upaya bantuan (kemampuan/kekuatan) militer kepada otoritas pemerintahan sipil, (9) Membangun kekuatan/korps warga masyarakat, (10) Mengimplementasikan Anggaran tahun

anggaran berjalan (tahun 2003) untuk mendukung program pertama tentang Inisiatif Tindakan menanggulangi bahaya teroris, (11) Membangun sistem pelatihan dan evaluasi nasional, (12) Memperluas sistem nasional dalam rangka memberikan bantuan pada para korban akibat teror

Landasan/basis kerangka kerja *Homeland Security*

Guna memungkinkan koordinasi dan integrasi upaya yang sifatnya lintas fungsional, lintas sektoral, lintas kewilayahan mekanisme dan tata kerja homeland security menggunakan landasan/basis kerangka kerja meliputi antara lain:

Hukum

Sepanjang sejarah perkembangan AS, bangsa Amerika senantiasa mengedepankan azas legal dalam membangun jaminan terhadap keamanan dan kemerdekaan nasionalnya. Hukum akan dapat menjamin keabsahan pengaturan tentang tata kerja dan mekanisme bagi pemerintah dalam mengambil sesuatu tindakan serta akan menentukan batas-batas kewenangan yang diijinkan oleh hukum. Strategi nasional untuk menjamin Kamdagri membutuhkan dukungan upaya badan legislatif agar me-

ungkinkan negara melakukan perlawanan dan perang menghadapi terorisme secara efektif. Hukum nasional yang baru tidak boleh mengambil hukum negara bagian tertentu yang tak penting kemudian menetapkannya sebagai hukum nasional dalam peperangan menghadapi terorisme. Pemerintah federal harus dengan teliti dan sungguh-sungguh melakukan perlindungan terhadap setiap bahaya yang mengancam kemerdekaan AS.

Strategi nasional mengidentifikasi 12 inisiatif utama pada wilayah ini yaitu: Pertama, pada tingkat pemerintah pusat/ federal (1) Meningkatkan infrastruktur pertukaran informasi kritis, (2) Menyelaraskan pertukaran informasi antara badan intelijen dengan badan penegak hukum, (3) Memperluas otoritas ekstradisi yang telah ada, (4) Mengkaji ulang otoritas untuk menggunakan bantuan militer dalam konteks kamdagri, (5) Menghidupkan kembali otoritas presiden untuk melakukan reorganisasi, (6) Menyiapkan fleksibilitas manajemen substansial untuk *Departement of Homeland Security*.

Kedua, pada tingkat pemerintah negara bagian: (1) Mengkoordinasikan standar minimal untuk pengarah (directive) kepada negara bagian, (2) Mengembangkan kapasitas jaminan

menghadapi terorisme, (3) Melatih perlindungan terhadap cyber attack, (4) Mencegah money laundering, (5) Meyakinkan upaya peradilan/*judiciary* secara berlanjut, (6) Mengkaji ulang otoritas karantina.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan kemampuan Iptek AS adalah kunci untuk dapat melakukan upaya jaminan Kamdagri AS terhadap ancaman teroris. Penemuan teknologi baru yang mampu mendukung analisis, pertukaran informasi, deteksi dini akan adanya kemungkinan serangan teroris, perlawanan terhadap senjata nuklir akan mampu membantu mencegah atau memperkecil dampak/kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan teroris dimasa datang.

Pemerintah pusat telah mengarahkan upaya nasional yang sistematis guna memperkuat Iptek dalam rangka mendukung pemeliharaan Kamdagri. Berbagai penelitian dan pengembangan telah dilakukan agar upaya untuk menjamin kamdagri semakin meyakinkan, mampu menanggulangi ancaman teroris masa datang, pasti akan lebih modern dan lebih tak terduga. Upaya litbang ini juga mencari solusi relevan agar upaya untuk mencegah dan me-

nanggulangi terorisme tidak menimbulkan duplikasi, inefisiensi serta mampu memberi arahan strategic yang lebih terpercaya dan meyakinkan. Upaya litbang dan perencanaan jangka panjang merupakan investasi yang cukup revolusioner dalam peningkatan kekuatan dan kemampuan AS agar AS bebas dari segala risiko tak terduga. Pemerintah pusat juga akan memanfaatkan energi secara cerdas dari sektor privat untuk membangun dan memproduksi sistem dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjamin kamdagri.

Strategi nasional untuk menjamin kamdagri mengidentifikasi 11 inisiatif utama pada area ini antara lain: (1) Mengembangkan upaya perlawanan terhadap kemungkinan teror nuklir; (2) Mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi niat teroris, (3) Mengaplikasikan teknologi biometrik untuk mengidentifikasi peralatan yang akan digunakan oleh teroris, (4) Meningkatkan kemampuan teknis dari responder pertama, (5) Mengkoordinasikan litbang peralatan/perengkapan kamdagri, (6) Mendirikan laboratorium nasional untuk Kamdagri, (7) Melibatkan para analis swasta dan analis independen dalam litbang kamdagri, (8) Mengembangkan mekanisme untuk memproduksi prototipe peralatan yang dibu-

tuhkan kamdagri, (9) Melaksanakan demonstrasi dan penyebaran/deployment pilot, (10) Menetapkan standar teknologi untuk kamdagri, dan (11) Membangun sistem litbang kamdagri yang bernilai dan berisiko tinggi.

Sistem pertukaran informasi

Sistem informasi memberi sumbangan sangat besar pada setiap aspek kegiatan kamdagri. Meskipun saat ini teknologo informasi AS adalah yang paling maju di dunia, namun secara nyata sumbangan sistem informasi yang ada sekarang belum secara penuh/optimal mendukung misi kamdagri. Database yang digunakan untuk penegakan hukum nasional/federal, imigrasi, intelijens, kesehatan masyarakat, penginderaan jauh, dan manajemen darurat belum terjalin dalam dalam satu jaringan komprehensif sehingga sering terjadi gap informasi atau sebaliknya terjadi informasi yang *redundance*.

Guna mendukung upaya kamdagri yang lebih baik, membangun sebuah jaringan sistem informasi nasional terpadu, meliputi semua fasilitas komunikasi pusat, pemerintah daerah dan lokal adalah tuntutan yang tak dapat dielakkan kalau AS ingin mendapatkan upaya menjamin kamdagri yang lebih tepercaya.

Strategi nasional untuk menjamin kamdagri mengidentifikasi 5 inisiatif utama pada wilayah ini yaitu: (1) Mengintegrasikan pertukaran informasi lintas fungsional pemerintah pusat, (2) Mengintegrasikan informasi lintas pemerintah daerah dan pemerintah lokal, industri swasta, dan penduduk pada umumnya. (3) Menerapkan standar "*meta data*" untuk informasi elektronik, relevan dengan pengembangan dan kebutuhan kamdagri, (4) Meningkatkan komunikasi pertolongan darurat terhadap masyarakat, (5) Menjamin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi kesehatan masyarakat

Kerja sama internasional

Di dunia di mana para teroris mengabaikan batas tradisional antar negara, maka strategi kamdagri AS sudah barang tentu tidak dapat berhenti pada batas antar negara. AS harus melaksanakan agenda internasional yang berlanjut dan jauh lebih sistematis, guna melawan ancaman teroris dalam rangka meningkatkan kualitas kamdagri. Kampanye internasional tentang anti teroris telah mengalami kemajuan yang besar, Lingkup yang lebih luas dari kegiatan ini, akan lebih mampu menggambarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai dan bagaimana

kecenderungannya ke depan.

Strategi nasional untuk menjamin kamdagri mengidentifikasi 9 inisiatif utama pada wilayah ini yaitu: (1) Mengembangkan wilayah perbatasan yang lebih solid, (2) Menindak dengan segera dan konsekuen terhadap pelanggaran dokumen imigrasi perjalanan palsu, (3) Meningkatkan pengamanan terhadap pengapalan kontainer internasional, (4) Mengintensifkan kerjasama penegakkan hukum internasional (5) Membantu bangsa/negara lain dalam penanggulangan terorisme, (6) Memperluas pengamanan terhadap infrastruktur transnasional yang kritis, (7) Memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan iptek kamdagri, (8) Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan ancaman teroris, (9) Mengkaji sumbangan AS terhadap berbagai perjanjian dan hukum internasional.

Biaya untuk mendukung Kamdagri AS

Pemerintah AS menyediakan dana sekitar 100 miliar USD pertahun guna mendukung misi Kamdagri. Biaya ini diperuntukkan mendukung kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah lokal, untuk menegakkan hukum dan pelayanan darurat serta biaya untuk mendukung operasi bantuan

dari kekuatan militer. Nilai guna yang didapat antara lain berupa penurunan risiko ancaman teroris, dan konsekuensi logis lainnya yang ditimbulkan oleh ancaman ini.

Berbagai kegiatan kamdagri yang dibiayai oleh pemerintah pusat antara lain dalam hal pengumpulan data dan informasi inbtelijens, pengamanan wilayah perbatasan, sedangkan yang dibiayai oleh pemerintah daerah antara lain adalah berbagai kegiatan yang dirancang khusus oleh pemda dalam konteks penanggulangan terorisme di daerahnya.

Kesimpulan, sebuah prioritas dalam menghadapi masa depan

Departemen Kamdagri AS telah menyusun serangkaian strategi nasional yang luas dan agenda yang kompleks. Strategi ini telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang beragam yang harus diwujudkan, program yang perlu dilaksanakan dan tanggung jawab yang harus dipikul. Hal ini membutuhkan penetapan prioritas-prioritas terhadap beberapa tindakan yang lebih kritikal atau lebih mendesak bila dibandingkan dengan lainnya. Proposal presiden pada tahun fiskal 2003 yang diajukan pada bulan Februari 2002 yang lalu menetapkan empat skala prioritas yang membutuhkan

tambahan sumberdaya dan perhatian yang lebih besar pada tahun mendatang yaitu: (1) Bantuan/support kepada pihak yang pertama kali membutuhkan, (2) Pertahanan terhadap bioterorisme, (3) Pengamanan perbatasan Amerika, (4) Pemanfaatan seluruh kemampuan teknologi abad 21 untuk menjamin kamdagri.

Empat skala prioritas tersebut secara substansial membutuhkan dukungan khusus yaitu: (1) Peningkatan kemampuan analitik dari FBI, (2) Pembangunan kemampuan baru melalui analisis informasi dan Divisi Perlindungan Infrastruktur dilingkungan Departemen Kamdagri, (3) Penguatan perbatasan antar negara agar lebih solid, (4) Rekapitalisasi *US Coast Guard*, (5) Pencegahan penggunaan senjata Nubika oleh teroris melalui peningkatan kemampuan sensor beserta prosedurnya, (6) Pengembangan spektrum vaksin yang lebih luas, anti mikrobiologi dan anti racun, dan (7) Pengintegrasian pertukaran informasi lintas kewilayahan dan lintas fungsional nasioinal.

Secara teknis operasional seluruh materi yang telah dikemukakan melalui strategi nasioinal kamdagri memerlukan penjabaran kedalam rencana yang lebih rinci dan tajam. Detail rencana ini harus mampu meyakinkan

para pembyar pajak bahwa uang yang mereka bayarkan memang benar-benar digunakan untuk mewujudkan sasaran khusus dengan penampilan yang berbasis pada ukuran-ukuran efektifitas.

Penutup

Bagi bangsa dan segenap pengembangan fungsi pemerintahan Amerika, tantangan betapa pun pahitnya adalah motivator penting guna mengembangkan prakarsanya agar predikat sebagai super power tetap diakui oleh dunia dan masyarakat antar bangsa. Untuk itu pemerintah dan bangsa Amerika bersatu-padu untuk mewujudkan superioritas terhadap gangguan sekecil apapun yang menyentuh harga diri bangsa Amerika.

Upaya tersebut bukan main-main, setiap rencana yang disusun oleh pemegang otoritas yang ditunjuk, betapapun rumitnya, didukung penuh oleh bangsanya, itulah salah satu kekuatan super power ketika mereka menghadapi pihak yang punya niat memusuhi mereka, betapapun besarnya biaya yang diminta akan dipenuhi.

Itulah salah satu karakter negara kaya dan sekaligus superpower. Semoga kita dapat mengambil hal-hal yang positif untuk membangun semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi